



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

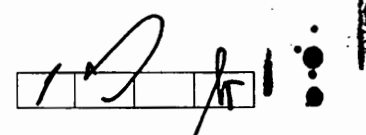
**PENDELEGASIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN OLEH BUPATI LAMANDAU  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pendelegasian Perizinan Dan Non Perizinan Oleh Bupati Lamandau Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.Ah.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;



21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusahan Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Perdagangan;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal.


#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN OLEH BUPATI LAMANDAU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Daerah adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lamandau.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap





permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan Non Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu atau kepada PD teknis.
13. Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
14. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah Standar Pelayanan Publik dilingkungan DPMPTSP.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional Prosedur dilingkungan DPMPTSP.
16. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
18. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

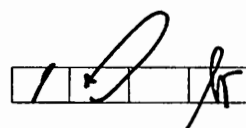
#### **Pasal 2**

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu satu Pintu, adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

#### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

**BAB III**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN**  
**Pasal 4**

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Online Single Submission (OSS).
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

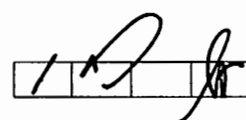
- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non Perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait tata perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi terkait lainnya.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEWENANGAN**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari PD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

**Pasal 7**

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada SPP dan SOP.
- (2) SPP dan SOP sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB V**  
**PENGADUAN**  
**Pasal 8**

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan PD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di BPPTPM dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Masing-masing PD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 10**

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

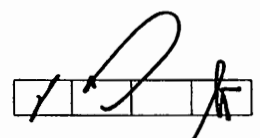
Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**Pasal 12**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 523) dan Peraturan pelaksanaan dibawahnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA


Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

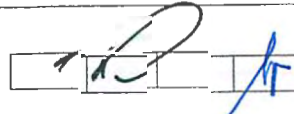
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2019 NOMOR 600

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG - UNDANGAN	TGL DOKUMEN 27 - 05 - 2019
	PARAF 

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR 14 TAHUN 2019**  
**TANGGAL 23 MEI 2019**  
**TENTANG PENDELEGASIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN OLEH BUPATI**  
**LAMANDAU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**

**JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**  
**YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**

No.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA		Jenis Izin
1	2	3		4
<b>I</b>	<b>Sektor Perdagangan</b>		<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	
		1	Izin Usaha Perdagangan	<b>Izin Usaha</b>
		2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	NIB
		3	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Usaha
		4	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha
		5	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Izin Usaha
		6	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A	Izin Usaha
		7	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A)	Izin Usaha
		8	Angka Pengenal Importir (API)	NIB
		9	Izin Distributor Pupuk Bersubsidi dan Non Bersubsidi	Izin Usaha
			<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Tanda Daftar Industri	Tanda Daftar
		2	Izin Pemakaian Kios/Lapak	Izin Pemakaian
		3	Izin Penggilingan Padi	Izin
		4	Izin Pasar	Izin
<b>II</b>	<b>Sektor Kesehatan</b>		<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	
		1	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial/Operasional
		2	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D dan Kelas C	Izin Usaha
		3	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D dan Kelas C	Izin Komersial/Operasional
		4	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/Operasional
		5	Izin Apotek	Izin Usaha





		6	Izin Toko Obat	Izin Usaha
			<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Izin Penyelenggaraan Optikal	Izin Penyelenggara
		2	Izin Praktek Dokter	Izin Praktek
		3	Izin Praktek Bidan	Izin Praktek
		4	Izin Praktek Perawat	Izin Praktek
		5	Izin Praktek Gizi	Izin Praktek
		6	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	Izin Praktek
		7	Izin Praktek Apoteker	Izin Praktek
		8	Izin Praktek Fisioterafis	Izin Praktek
		9	Izin Pelayanan Sehat Pakai Air	Izin Pelayanan
		10	Izin Praktek Okupasi Terapis	Izin Praktek
		11	Izin Praktek Terafis Wicara	Izin Praktek
		12	Izin Praktek Refraksionis Optisien	Izin Praktek
		13	Izin Praktek Radiografer	Izin Praktek
		14	Izin Bagi Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif	Izin Kerja
		15	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	Izin Operasional
		16	Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional	Sertifikat
		17	Surat Izin Pengobatan Tradisional	Izin Praktek
		18	Surat Izin Higienis Sanitasi Depot Air Minum	Sertifikat
<b>III</b>	<b>Sektor Perhubungan</b>		<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	
		1	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
		2	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha
		3	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha
		4	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN)	Izin Komersial/Operasional
		5	Sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor	Izin Komersial/Operasional
			<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Izin Angkutan Bermotor	Izin Angkutan
		2	Izin Angkutan Barang Khusus	Izin Angkutan
		3	Izin Trayek Darat/Sungai	Izin Trayek
		4	Izin Trayek Angkutan Pedesaan	Izin Angkutan
		5	Izin Usaha Angkutan Bermotor	Izin Angkutan
<b>IV</b>	<b>Sektor Ketenagakerjaan</b>		<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	
		1	BPJS Ketenagakerjaan	Pendaftaran

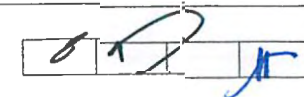
		2	Pengesahan RPTKA	Pendaftaran
		3	Izin Kantor Cabang	Izin Usaha
		4	Izin Tempat Penampungan	Izin Usaha
		5	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha
		6	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Izin Usaha
		7	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha
		8	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Operasional / Komersial
			<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	Izin Pendirian
<b>V</b>	<b>Sektor Kepariwisata</b>		<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	
		1	Izin Pengelolaan Museum	Izin Usaha
		2	Izin Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Izin Usaha
		3	Izin Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami	Izin Usaha
		4	Izin Wisata Agro	Izin Usaha
		5	Izin Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat	Izin Usaha
		6	Izin Pengelolaan Objek Ziarah	Izin Usaha
		7	Izin Kawasan Pariwisata	Izin Usaha
		8	Izin Angkutan Jalan Wisata	Izin Usaha
		9	Izin Angkutan Wisata di Sungai dan Danau	Izin Usaha
		10	Izin Agen Perjalanan Wisata	Izin Usaha
		11	Izin Biro Perjalanan Wisata	Izin Usaha
		12	Izin Restoran	Izin Usaha
		13	Izin Rumah Makan	Izin Usaha
		14	Izin Jasa Boga	Izin Usaha
		15	Izin Pusat Penjualan Makanan	Izin Usaha
		16	Izin Bar/Pub	Izin Usaha
		17	Izin Kafe	Izin Usaha
		18	Izin Hotel	Izin Usaha
		19	Izin Pondok Wisata	Izin Usaha
		20	Izin Bumi Perkemahan	Izin Usaha
		21	Izin Persinggahan	Izin Usaha
		22	Izin Vila	Izin Usaha
		23	Izin Kondominium Hotel	Izin Usaha
		24	Izin Apartemen Servis	Izin Usaha
		25	Izin Rumah Wisata	Izin Usaha

1 2 3 4 5

	26	Izin Jasa Manajemen Hotel	Izin Usaha
	27	Izin Hunian Wisata Senior / Lanjut Usia	Izin Usaha
	28	Izin Sanggar Seni	Izin Usaha
	29	Izin Jasa Impresariat / Promotor	Izin Usaha
	30	Izin Galeri Seni / Pertunjukan Seni	Izin Usaha
	31	Izin Rumah Bilyar	Izin Usaha
	32	Izin Lapangan Golf	Izin Usaha
	33	Izin Gelanggang Bowling	Izin Usaha
	34	Izin Gelanggang Renang	Izin Usaha
	35	Izin Lapangan Sepak Bola / Futsal	Izin Usaha
	36	Izin Lapangan Tennis	Izin Usaha
	37	Izin Wisata Olahraga Minat Khusus	Izin Usaha
	38	Izin Wisata Petualangan Alam	Izin Usaha
	39	Izin Taman Bertema	Izin Usaha
	40	Izin Taman Rekreasi	Izin Usaha
	41	Izin Kelab Malam	Izin Usaha
	42	Izin Diskotik	Izin Usaha
	43	Izin Karaoke	Izin Usaha
	44	Izin Arena Permainan	Izin Usaha
	45	Izin Panti / Rumah Pijat	Izin Usaha
	46	Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Izin Usaha
	47	Izin Jasa informasi Pariwisata	Izin Usaha
	48	Izin Konsultan Pariwisata	Izin Usaha
	49	Izin Pramuwisata	Izin Usaha
	50	Izin Wisata Arung Jeram	Izin Usaha
	51	Izin wisata Selam	Izin Usaha
	52	Izin Wisata Dayung	Izin Usaha
	53	Izin Wisata Selancar	Izin Usaha
	54	Izin Wisata Olahraga Tirta	Izin Usaha
	55	Izin Wisata Memancing	Izin Usaha
	56	Izin Dermaga Wisata	Izin Usaha
	57	Izin SPA	Izin Usaha
		<b>NON BERUSAHA</b>	
	1	Izin Persewaan Audio Visual, VCD dan sejenis Play Station, TV kabel.	Izin Sewa



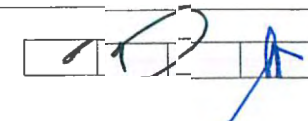

VI	Sektor Pertanian dan Perikanan		PERIZINAN BERUSAHA	
		1	IUP-B, IUP-P, IUP dan Izin Usaha Perbenihan Tanaman	Digabung Menjadi Izin Usaha Perkebunan
		2	Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha
		3	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		4	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha
		5	Izin Usaha Perternakan	Izin Usaha
		6	Pendaftaran Usaha Perkebunan (skala kecil)	Izin Usaha
		7	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
		8	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha
		9	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha
		10	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	Izin Komersial/Operasional
		11	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	Izin Komersial/Operasional
		12	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan	Izin Komersial/Operasional
		13	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	Izin Komersial/Operasional
		14	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi	Izin Komersial/Operasional
			<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Izin Penangkaran Walet	Izin Penangkaran
		2	Izin Usaha Peternakan	Izin Peternakan
		3	Izin Rumah Potong Hewan	Izin Rumah Potong Hewan
		4	Izin Usaha Perikanan	Izin Perikanan
		5	Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STB)	Tanda Daftar
		6	Izin Tempat Pemotongan Hewan	Izin TPH
		7	Surat Izin Penangkapan Ikan Perikanan	SIPI
		8	Surat Izin Pembudidayaan Ikan Perikanan	SIPBI
		9	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	SIKPI
VII	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan		PERIZINAN BERUSAHA	
		1	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil (Kegiatan Penyimpanan LB3)	Izin Komersial/Operasional
		2	Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)	Izin Usaha
		3	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial/Operasional
		4	Izin Lingkungan	Izin Usaha
VIII	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		PERIZINAN BERUSAHA	
		1	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha





		2	Izin Mendirikan Bangunan	Komitmen Izin Usaha
		3	Surat Izin Peil Banjir	Komitmen Izin Usaha
		4	Sertifikat Laik Fungsi	Komitmen Izin Usaha
			<b>NON BERUSAHA</b>	Izin Usaha
		1	Izin Perubahan Peruntukan Tanah	IPPT
			Izin Penyewaan Alat Berat	Izin Penyewaan
			Izin Tempat Pemakaman	Izin Tempat Pemakaman
			Izin Tempat Pembuangan Akhir dan Pelayanan Angkutan Kebersihan	Izin Tempat Pembuangan
			Izin Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan	Izin Angkutan
			Izin Pengelolaan Sampah dan Air Kotor	Izin Pengelolaan
			Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau	Izin Pemakaian Lokasi
			Izin Mengangkut Jenazah Keluar Wilayah Kabupaten Lamandau	Izin Angkut
			Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman	Izin Jasa
			Izin Usaha Angkutan Jenazah	Izin Angkut
			Izin Rumah Kost	Izin Rumah Kost
			Izin Usaha Pemanfaatan Ruang (IPPR)	Izin Pemanfaatan
<b>IX</b>	<b>Sektor Komunikasi dan Informatika</b>		<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	Izin Komersial/Operasional
		1	Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Izin Komersial/Operasional
		2	Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Izin Komersial/Operasional
		3	Perizinan Penyelenggaraan Pos	Izin Komersial/Operasional
		4	Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Izin Komersial/Operasional
		5	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV dan Radio	Izin Komersial/Operasional
		6	Lembaga Penyiaran Berbayar (TV	Izin Komersial/Operasional
		7	Lembaga Penyiaran Komunitas (TV dan Radio)	Izin Komersial/Operasional
		8	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (TV dan Radio)	Izin Komersial/Operasional
			<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Izin Warung Telekomunikasi	Izin Wartel
		2	Izin Instalatur Kable Rumah dan Gedung	Izin IKR/G
		3	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	Izin Kantor Cabang
		4	Izin Instalansi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi	Izin Instalansi
		5	Izin Instalansi Genset Menara Telekomunikasi	Izin Instalansi
		6	Izin Penggalian Kabel Telekomunikasi	Izin Pengalians
		7	Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi	Izin Penempatan Perangkat
		8	Izin TV Kabel	Izin TV Kabel
		9	Izin Warung Internet	Izin Warnet
		10	Izin Pendirian Menara Telekomunikasi	Izin Pendirian
<b>XI</b>	<b>Sektor Pendidikan dan Kebudayaan</b>		<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	

		1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Izin Usaha
		2	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK	Izin Komersial/Operasional
		3	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama	Izin Komersial/Operasional
		4	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Izin Komersial/Operasional
		5	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan Modal Asing	Izin Komersial/Operasional
		6	Izin Usaha Pengedaran Film	Izin Usaha
		7	Izin Usaha Pertunjukan Film	Izin Usaha
		8	Izin Usaha Penjualan dan/atau Penyewaan Film	Izin Usaha
			<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Izin Taman Bacaan Masyarakat	Izin Taman Bacaan
		2	Izin Usaha Sanggar Budaya	Tanda Daftar Usaha Sanggar
<b>XII</b>	<b>Sektor Agama dan Keagamaan</b>		<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	
		1	Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan	Izin Komersial/Operasional
		2	Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Izin Komersial/Operasional
		3	Izin Penyelenggaraan Ibadah Umrah bagi Penyelenggara Ibadah Umrah	Izin Komersial/Operasional
		4	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Komersial/Operasional
<b>XIII</b>	<b>Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>		<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	
		1	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha
		2	Izin Usaha Mikro dan Kecil	Izin Usaha
		3	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional
		4	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional
		5	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional
			<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Izin Koperasi Bukan Simpan Pinjam	Izin Koperasi
		2	Izin Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu Koperasi Bukan Simpan Pinjam	Izin Kantor
		3	Izin Pemakaian Kios / Lapak	Izin Pemakaian
		4	Izin Penggilingan Padi	Izin Penggilingan
<b>XIII</b>	<b>Sektor Minyak dan Gas</b>		<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Izin Pangkalan Elpigi	Izin Pangkalan
		2	Izin Pengumpul dan Penyaluran Pelumas Bekas	Izin Pengumpul
<b>XIV</b>	<b>Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		<b>NON BERUSAHA</b>	
		1	Izin Penelitian	Izin Penelitian
		2	Izin Kuliah Kerja Nyata	Izin KKN
<b>XIV</b>	<b>Sektor Sosial</b>		<b>NON BERUSAHA</b>	



	1	Izin Pengumpulan Uang atau Barang	Izin Pengumpulan
	2	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	Izin Penyelenggaraan
	3	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	Izin Operasional
	4	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	Tanda Daftar

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Mei 2019**



**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Mei 2019**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**MASRUN**